

Susno Duadji Resmi Jadi Kader PKB, Bakal Dijadikan Caleg dari Sumsel

JAKARTA (IM) - Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji kini telah resmi menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rencananya, Susno bakal dimajukan sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PKB untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel).

"Iya benar. Iya (dimajukan) caleg. Sejauh ini di Sumatera Selatan, tapi belum tahu pastinya seperti apa," kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (31/1).

Daniel menyatakan, keinginan Susno bergabung ke PKB sudah sejak lama. Akan tetapi, Daniel tak menyebutkan kapan Susno resmi bergabung ke PKB.

"Sudah dari kemarin-kemarin, karena Pak Susno dapat tugas membangun desa dengan pengalamannya selama ini," ujar Daniel.

Sebelumnya, Ketua

DPW Partai PKB Sumsel Ramlan Holdan menyampaikan hal senada soal bergabungnya Susno. Dia bahkan menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) Susno Duadji kepada wartawan.

Menanggapi itu, Susno tidak menjawab tegas. Namun, ia memastikan sudah berkomunikasi dengan banyak pimpinan partai politik.

"Saya itu kalau diajak semua partai toh semua teman, mau semua. Nanti ada PKB ngajak, gabung kami, siap saya dukung," kata Susno usai acara diskusi publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Indonesia, di Hotel Diradja, Jakarta, Selasa (31/1).

Susno tidak secara spesifik mengungkapkan alasannya memilih bergabung PKB. Akan tetapi, ia mengaku dirinya siap bergabung partai politik dalam rangka memperjuangkan dan memperbaiki bangsa Indonesia. ● **mei**

Megawati Bahas Pencalonan Kaesang di Pilwalkot Solo 2024 dengan Gibran

SOLO (IM) - Kabar terkait masuknya Kaesang Pangarep ke dunia politik menarik perhatian banyak pihak tak terkecuali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bahkan

Megawati menginisiasi pembicaraan soal Kaesang saat dirinya bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, setelah acara pelantikan Heverita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang periode 2021-2026, Senin kemarin.

"Beliau dulu yang menginisiasi soal pembicaraan Kaesang. Rahasia. Respons rahasia. Rahasia kabeh," beber Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (31/1).

Kaesang sendiri sebe-

lumnya dikabarkan akan maju sebagai calon Wali Kota Solo dalam Pilkada 2024 mendatang. Dirinya diusulkan berpasangan dengan Putra FX. Hadi Rudyatmo, Rio Fernandes.

Ditanya soal tersebut, Gibran mengungkapkan jika Kaesang dan Rio adalah pasangan yang cocok untuk maju ke Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo. Namun demikian, ketentuan siapa yang bakal bertarung di Pilwalkot Solo 2024 adalah keputusan Ketua DPC PDI-P Solo.

"Yang menentukan pak ketua DPC. Rio cocok bagus. Intinya masuk penjurangan muda, saya senang makin banyak anak-anak muda yang ikut berkontribusi," katanya. ● **mei**

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK bakal memanggil peserta Indonesian Idol 2014, Windy Yunita Gemary sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

KPK sudah mengajukan permohonan kepada pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Windy bepergian ke luar negeri.

"Iya kami pasti akan panggil yang bersangkutan sebagai saksi," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (31/1).

Ali berharap, Windy bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan seputar dugaan suap hakim agung. Sejak ini KPK belum membeberkeran keterkaitan Windy dalam perkara jual beli perkara di Mahkamah Agung ini.

"Kami berharap saksi ini juga nantinya kooperatif hadir," ujar Ali.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham mengonfirmasi telah mencegah Windy bepergian ke luar negeri. Selain Windy, Imigrasi mencegah pengusaha bernama Dadan Tri Yudianto. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton.

Keterkaitan yang telah terungkap adalah hubungan Dadan dengan kasus suap perkara di MA. Dalam dakwaan terduga penyuap hakim agung, Theodoros Yosep Parera dan Eko Suparno, Dadan disebut menjadi penghubung Heryanto Tanaka dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan terkait kasasi perkara pidana KSP Intidana.

Dadan kemudian meminta uang atas pengurusan perkara itu kepada Heryanto Tanaka.

"Selanjutnya Heryanto Tanaka memerintahkan Na Sutikna Halim Wijaya untuk mentransfer uang dengan total Rp 11.200.000.000," sebagaimana dikutip dari dakwaan Jaksa KPK. Na Sutikna merupakan bagian keuangan PT Tarunakusuma Purinusua.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim, sejumlah pegawai MA, dan pengacara. Mereka diduga melakukan tindak pidana suap pengurusan perkara kasasi KSP Intidana di Mahkamah Agung. Sampai saat ini, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak dua di antaranya merupakan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KUNJUNGAN MENKO PMK DI PERUMAHAN TERDAMPAK BANJIR BANDANG

Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) memberikan mainan kepada sejumlah anak korban banjir saat kunjungan kerja ke wilayah perumahan yang terdampak musibah banjir bandang pada (6/1) di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Jawa Tengah, Selasa, (31/1). Dalam kunjungan tersebut Muhadjir Effendy menyalurkan santunan masing-masing Rp15 juta bagi warga terdampak banjir yang meninggal, membagikan paket sembako dan mainan kepada seluruh keluarga korban banjir, serta berjanji akan mendorong kementerian terkait untuk memperkuat tanggul serta memnormalisasi Sungai Pengkol-Babon guna mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah setempat.

Jalan Koalisi Perubahan, Demokrat, PKS dan NasDem Semakin Terjal

Nasdem dinilai tidak terlalu rugi jika "Koalisi Perubahan" tidak jadi dibentuk. Namun Demokrat dan PKS akan rugi karena akan sulit mempromosikan kandidat capres lain.

JAKARTA (IM) - Proses konsolidasi "Koalisi Perubahan" yang digagas Partai NasDem, PKS dan Demokrat, dinilai semakin terjal setelah mereka menyatakan mendukung Anis Baswedan sebagai calon presiden di Pilwalkot 2024. Dirtektur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan tantangan berikutnya mempertahankan koalisi poros perubahan ditengah isu penjagalan yang semakin kuat.

Aksi NasDem dan sikap Demokrat serta PKS terkait pembentukan sekretariat perubahan tidak lepas dari kompleksitas internal Koalisi Pe-

rubahan. Dalam hal ini NasDem seperti partai pengendali karena telah mengucangi Anies sebagai bakal capres.

Sementara itu, PKS dan Demokrat butuh koalisi perubahan karena kedua partai itu sulit berkomunikasi dengan koalisi lain akibat tergantung pada Anies.

"Jadi NasDem punya kartu utama Anies Baswedan, sedangkan PKS dan Demokrat tidak mungkin melepaskan Anies begitu saja karena selama ini ruang koalisi Demokrat dan PKS ada poros perubahan sangat kecil kemungkinan bergabung dengan poros koalisi lain, apalagi

PKS dan Demokrat terkesan bergantung pada figur Anies," kata Ikhwan, dalam keterangannya, Selasa (31/1).

Ikhwan menilai, aksi NasDem bisa dikategorikan seperti soal deadlock koalisi perubahan hingga penajakan diri ke partai lain sebagai ancaman, karena partai di koalisi perubahan enggan mendeklarasikan Anies sebagai Bakal Calon Presiden.

"Jadi ancaman secara halus yang dilontarkan Partai NasDem sangat wajar ketika kalkulasi politik antara Partai Demokrat dan PKS terhadap NasDem belum juga menentukan garis terang, padahal komunikasi politik yang dibangun sudah cukup lama," kata Ikhwan.

"Apalagi poros perubahan secara resmi belum mendeklarasikan mendukung Anies, jadi wajar saja NasDem membutuhkan kepastian mau lanjut atau tidak di poros

perubahan, sebab koalisi lain sudah membentuk deklarasi secara resmi seperti KIB, KIR yang sudah membentuk sekber koalisi," sambungnya.

Selain itu, ketiga partai juga dinilai akan mengalami kerugian jika koalisi perubahan tidak terbentuk. Akan tetapi, NasDem tidak akan terlalu rugi karena mengucangi Anies lewat sosialisasi partai. Di sisi lain, Demokrat dan PKS akan dirugikan karena mereka sulit mempromosikan kandidat lain.

PKS dan Demokrat juga dinilai sulit pindah karena partai lain sudah mulai menentukan kandidat bakal capres-cawapres untuk Pemilu 2024. "PKS dan Demokrat akan sulit membangun chemistry politik di luar poros perubahan. Wajar saja NasDem menjajaki koalisi lain karena tidak ada kepastian secara resmi dari PKS dan Demokrat, kecuali ada pernyataan dari PKS dan Demokrat 'kami mendukung Anies sebagai capres.' Hingga hari ini deklarasi

koalisi secara resmi saja belum," kata Ikhwan.

Ikhwan menambahkan, aksi Demokrat menggagas sekber perubahan adalah tanda bahwa manuver NasDem dalam pengusungan Anies berhasil. Dengan demikian, partai-partai di koalisi perubahan sepakat untuk membentuk koalisi secara penuh. Ikhwan pun menilai kedatangan NasDem ke Sekber Gerindra-PKB demi meningkatkan daya tawar Anies. Hal itu dilakukan agar partai lain mau merapat.

Di sisi lain, Ikhwan tidak memungkiri kalau aksi NasDem datang ke Sekber Gerindra-PKB sebagai sinyal untuk menghentikan aksi Demokrat yang ngotot ingin menyandingkan AHY dengan Anies. Namun, aksi NasDem bukan berarti sebagai upaya menekan elektabilitas Demokrat yang kini berada di atas NasDem dalam sejumlah survei karena semua partai di koalisi perubahan pasti dapat efek elektoral dari pengusungan Anies. ● **mar**

Kedaluwarsa Tuntutan Vonis Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Konstitusional

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, ketentuan kedaluwarsa menuntut pidana mati atau seumur hidup setelah 18 tahun tetap relevan dan konstitusional.

Sebab itu, majelis hakim MK menolak uji materi Pasal 78 Ayat (1) Angka (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan tersebut.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa (31/1).

Gugatan nomor 86/PUU-XX/2022 ini diajukan seorang warga bernama Robiyanto. Ia adalah anak dari Taslim alias Cikok yang merupakan korban pembunuhan

sadis di Kepulauan Riau pada 2002 lalu.

Dalam kasus pembunuhan Cikok, polisi saat itu telah menetapkan 7 orang tersangka, tetapi hanya 2 orang yang diadili hingga berkekuatan hukum tetap, sedangkan 5 lainnya berstatus buron.

Dalam proses persidangan, majelis hakim pun menetapkan dua orang lain menjadi tersangka, tetapi polisi kemudian menghentikan proses penyidikan kasus ini karena dianggap sudah kedaluwarsa.

Menurut Robiyanto, adanya masa kedaluwarsa itu merugikan dirinya karena tidak mendapatkan keadilan atas kematian orangtuannya. Dalam gugatannya, Robiyanto menilai, masa kedaluwarsa dalam kasus dengan ancaman pidana mati/seumur hidup semestinya dilipatgandakan menjadi 36 tahun.

Angka tersebut dianggapnya sepadan dengan masa kedaluwarsa dalam kasus dengan ancaman pidana 3 tahun maupun 3 tahun lebih yang dua kali lipatnya, yakni 6 tahun dan 12 tahun.

Akan tetapi, MK menolak permohonan Robiyanto karena dinilai bakal menimbulkan persoalan terkait validitas alat bukti dalam mengungkap adanya tindak pidana.

Hakim MK Suhartoyo mengatakan, lamanya kurun waktu kedaluwarsa dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang valid, baik itu keterangan saksi dan tersangka/terdakwa serta barang bukti. Sebab, dalam kurun waktu tersebut, sangat dimungkinkan terjadinya penggantian aparat penegak hukum yakni penyidik dan penyidik. ● **han**



RAPAT KERJA KEMENPORA DENGAN KOMISI X DPR RI

Menpora Zainudin Amali (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1). Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023, serta program anggaran Kemenpora sesuai struktur organisasi baru.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini PT. MANAGEMENT BANYAN TREE RESORTS AND SPAS ("Perseroan"), berkedudukan di Bintan, Kepulauan Riau, mengundang segenap pemegang saham kepada untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Jl. Teluk Barambang Site A4, Laguna Bintan Resorts, Teluk Sebang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau atau Telekonferensi melalui Ms. Teams meeting

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:
1. Membahas perubahan komposisi Direksi Perseroan;
2. Membahas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebetulnya Rp 2.417.500.000; (dua milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp. 3.868.000.000; (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus Rupiah);
3. Membahas bahwa dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, maka Perseroan akan mengeluarkan saham baru sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham ("Saham Baru"), dengan masing-masing saham memiliki nilai Rp 967.000, (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), dan
4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bahwa sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") Perusahaan juga menawarkan sejumlah Saham Baru sesuai dengan jumlah kepemilikan saham kepada setiap pemegang saham Perseroan, dimana dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bintan, 01 Februari 2023

Direksi

PT. Management Banyan Tree Resorts and Spas